

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

.1. Pengantar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak korupsi di negara-negara muslim terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya dan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan di negara yang korupsinya tinggi dengan negara yang tingkat korupsinya rendah. Negara muslim yang diteliti adalah negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang merupakan negara Muslim. Definisi negara Muslim adalah negara yang konstitusional Islam atau mayoritas penduduknya Islam. Semua negara muslim dapat bergabung dalam OKI. OKI merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969 (12 Rajab 1389 H). OKI memiliki 57 (lima puluh tujuh) negara anggota. Namun dengan keterbatasan data yang ada, maka dari ke-57 negara tersebut, negara Muslim yang diteliti menjadi 31 (tiga puluh satu) negara, yaitu Bangladesh, Turkmenistan, Cote d'Ivoire, Pakistan, Tajikistan, Azerbaijan, Indonesia, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Albania, Sierra Leone, Togo, Uganda, Kazakhstan, Benin, Iran, Mali, Algeria, Lebanon, Morocco, Maldives, Burkina Faso, Egypt, Turkey, Kuwait, Tunisia, Malaysia, Jordan, Bahrain, Oman, dan Brunei. Secara lebih spesifik ke-31 negara ini dipisahkan menjadi dua kelompok berdasarkan tingkat korupsi di masing-masing negara, yaitu kelompok pertama (negara korupsi tinggi) yaitu negara yang memiliki tingkat korupsi yang relatif tinggi (memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kurang dari tiga (*Transparency International*, 2007)). Kelompok kedua (negara korupsi rendah) yaitu negara yang memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah (memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) lebih dari atau sama dengan tiga (*Transparency International*, 2007)). Pengelompokan kategori tersebut berdasarkan pada ukuran tertinggi dan terendah nilai IPK yang digunakan oleh lembaga Transparansi dalam mengelompokkan negara terbersih dan negara terkorup.

Tabel 4.1. Pembagian Negara Berdasarkan Tingkat Korupsinya

No	Negara Korupsi Tinggi	IPK	No	Negara Korupsi Rendah	IPK
1	Bangladesh	1.7	1	Algeria	3.1
2	Turkmenistan	1.8	2	Lebanon	3.1
3	Cote d'Ivoire	1.9	3	Morocco	3.2
4	Pakistan	2.1	4	Maldives	3.3
5	Tajikistan	2.1	5	Burkina Faso	3.4
6	Azerbaijan	2.2	6	Egypt	3.4
7	Indonesia	2.2	7	Turkey	3.5
8	Uzbekistan	2.2	8	Kuwait	4.7
9	Kyrgyz Republic	2.3	9	Tunisia	4.9
10	Albania	2.4	10	Malaysia	5.1
11	Sierra Leone	2.4	11	Jordan	5.7
12	Togo	2.4	12	Bahrain	5.8
13	Uganda	2.5	13	Oman	6.3
14	Kazakhstan	2.6	14	Brunei	u.p
15	Benin	2.9			
16	Iran	2.9			
17	Mali	2.9			

Sumber : Survey Transparansi Internasional, 2006

Untuk mengetahui dampak korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan menganalisa pengaruh kebijakan fiskal (penerimaan dan pengeluaran) pemerintah terhadap kesejahteraan di dua kelompok negara tersebut. Selanjutnya dianalisa tingkat kesejahteraan masyarakat di negara yang korupsinya tinggi dengan negara yang tingkat korupsinya rendah.

4.2. Gambaran Umum Data Penelitian

4.2.1. Kesejahteraan Masyarakat Negara Muslim

Mewujudkan kesejahteraan umum yang adil dan merata baik materiil maupun jiwa merupakan tujuan utama dari sebuah konsep pembangunan Islam. Kesejahteraan masyarakat di negara-negara Muslim sebagaimana ditunjukkan pada tabel L.1. yang lampiran di atas mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

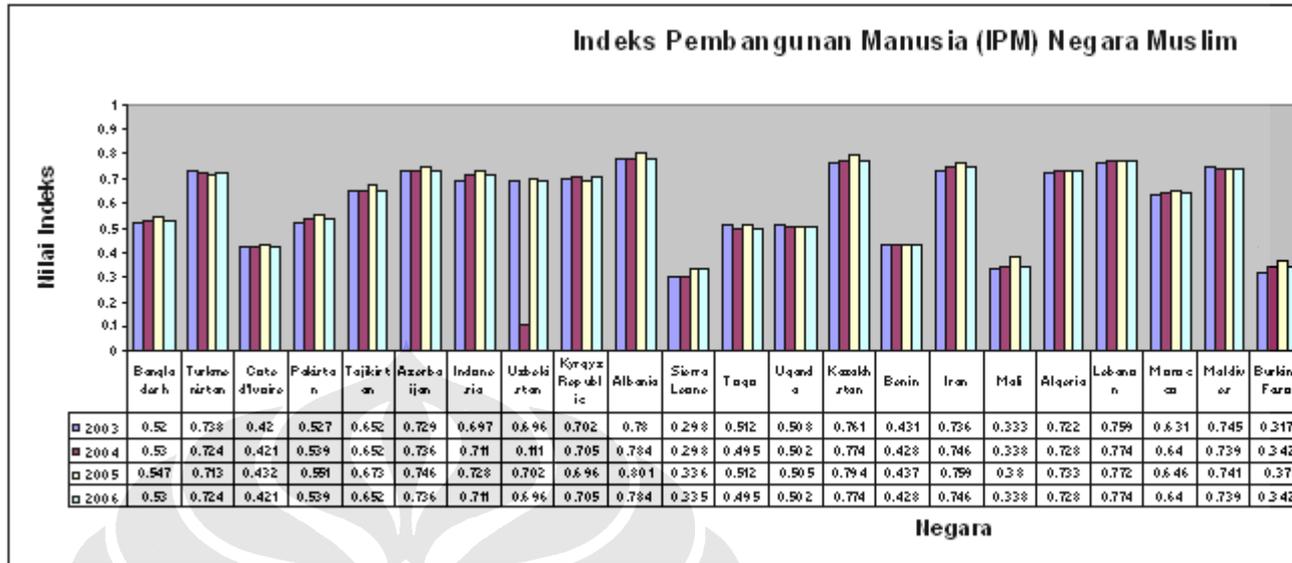
Ukuran kesejahteraan masyarakat pada grafik dibawah ini adalah menggunakan kriteria Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal dengan

Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP setiap tahunnya. HDI adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil-hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. HDI juga mengartikan kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar Pendapatan Domestik Bruto (PDB). HDI memberikan suatu gambaran yang lebih lengkap mengenai pembangunan sebuah negara dibandingkan indikator-indikator lain, seperti GDP per kapita.

HDI memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu; *pertama*, kesehatan (diukur dari usia harapan hidup); *kedua*, pendidikan (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi); dan *ketiga*, standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Sebagai contoh, HDI tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti ketidaksetaraan, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia.

Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Grafik 4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di 31 Negara Muslim Tahun 2003-2006



Negara-negara diklasifikasikan dalam tiga golongan berdasarkan IPM mereka, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Batas nilai bagi negara maju adalah IPM diatas 0,800 (kategori tinggi), negara terbelakang mempunyai IPM 0,500 ke bawah (kategori rendah).

Berdasarkan klasifikasi kategori IPM, maka nampak pada tabel tersebut bahwa negara Muslim sebagian besar berada pada kategori rendah hingga menengah pada *time series* 2003-2006. Hanya negara-negara tertentu yang konsisten termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Brunei Darussalam, Kuwait dan Bahrain. Sedangkan untuk negara Malaysia dan Oman mulai dikategorikan IPM tinggi sejak tahun 2004.

Di antara negara Muslim tersebut yang tertinggi pencapaiannya adalah Brunei Darussalam yang mendekati posisi HDI negara maju. Negara-negara Muslim berpenduduk besar seperti Indonesia, Mesir, Pakistan dan Bangladesh berada pada posisi yang jauh lebih rendah yaitu pada kategori menengah dan mendekati rendah.

Lebih lanjut kondisi HDI dari tahun ke tahun di masing-masing negara tidak menunjukkan perbaikan. Secara rata-rata stagnan pada posisinya. Hal ini mengindikasikan tidak ada upaya perbaikan yang signifikan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagaimana kita ketahui, sepeninggal Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, Islam secara perlahan dan pasti mulai mengalami kontradiksi kenegaraan yang ditandai dengan meningkatnya perluasan wilayah di satu sisi namun kemunduran sistem bernegara di sisi yang lain. Umat muslim seharusnya sedih menjadi negara yang miskin di tengah sumber daya alam yang amat kaya ini.

4.2.2. Korupsi Negara Muslim

Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim termasuk yang paling tinggi di dunia. Sangat ironis, masalah korupsi di negara Muslim, makin hari makin buruk.

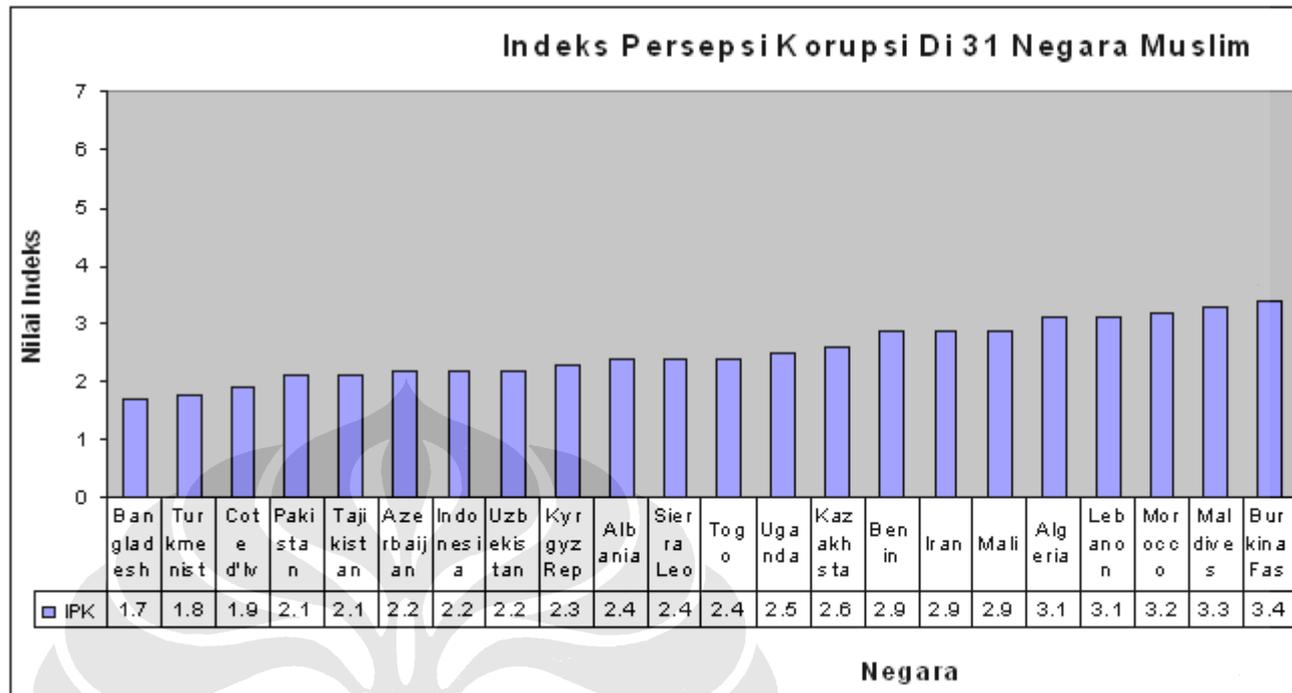
Dengan keterbatasan data yang ada penulis mencoba untuk mengelompokkan 31 dari 57 negara anggota OKI kedalam dua kelompok. Bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Kelompok Negara Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

No	Negara Korupsi Tinggi	IPK	No	Negara Korupsi Rendah	IPK
1	Bangladesh	1.7	1	Algeria	3.1
2	Turkmenistan	1.8	2	Lebanon	3.1
3	Cote d'Ivoire	1.9	3	Morocco	3.2
4	Pakistan	2.1	4	Maldives	3.3
5	Tajikistan	2.1	5	Burkina Faso	3.4
6	Azerbaijan	2.2	6	Egypt	3.4
7	Indonesia	2.2	7	Turkey	3.5
8	Uzbekistan	2.2	8	Kuwait	4.7
9	Kyrgyz Republic	2.3	9	Tunisia	4.9
10	Albania	2.4	10	Malaysia	5.1
11	Sierra Leone	2.4	11	Jordan	5.7
12	Togo	2.4	12	Bahrain	5.8
13	Uganda	2.5	13	Oman	6.3
14	Kazakhstan	2.6	14	Brunei	u.p
15	Benin	2.9			
16	Iran	2.9			
17	Mali	2.9			

Sumber : Survei Transparansi Internasional, 2005

Grafik 4.2. Indeks Persepsi Korupsi Di 31 Negara Muslim



Berdasarkan hasil survei lembaga Transparansi Internasional tahun 2006 terhadap 163 negara di dunia, negara-negara yang dikategorikan terbersih dari praktik korupsi adalah Islandia, Finlandia, Selandia Baru (sama-sama menduduki posisi ke-1), Denmark (urutan ke-4), Singapura (urutan ke-5), Swedia (urutan ke-6), Swiss (urutan ke-7), Norwegia (urutan ke-8), Australia dan Belanda (urutan ke-9). Sedangkan negara-negara yang masuk dalam kategori negara terkorup adalah Belarusia, Kamboja, Pantai Gading, Guinea Khatulistiwa Uzbekistan (menduduki posisi ke-151), Republik Demokrasi Kongo, Chad, Bangladesh, Sudan (posisi ke-156), Guinea, Irak, Myanmar (urutan ke-160), dan Haiti pada ranking terakhir. Sehingga nampak bahwa posisi negara terkorup umumnya diduduki oleh negara Muslim.

Jika diantara negara Muslim tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok negara dengan tingkat korupsi tinggi (IPK kurang dari tiga) dan kelompok negara dengan tingkat korupsi rendah (lebih dari atau sama dengan tiga), maka hasilnya ialah lebih banyak negara Muslim yang berada pada kelompok pertama. Pengelompokkan kategori tersebut berdasarkan pada ukuran tertinggi dan terendah nilai IPK yang digunakan oleh lembaga Transparansi dalam mengelompokkan negara terbersih dan negara terkorup. Khusus untuk Brunei Darussalam tidak termasuk dalam negara yang disurvei sehingga tidak diketahui IPK nya. Namun Brunei Darussalam memiliki peringkat tertinggi *Global Transparency Index*.

Korupsi adalah persoalan serius yang tidak saja karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga terbukti membawa dampak yang sangat merugikan bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga korupsi secara langsung atau tidak langsung akan mengganggu terwujudnya tatanan perekonomian islami sebagaimana diidealkan di dalam Islam.

Para ahli ekonomi Islami dituntut untuk berkontribusi aktif dalam upaya pemberantasannya. Dengan penduduk mayoritas muslim, harus ada introspeksi mengapa justru mentalitas korup begitu merajalela. Padahal Islam sangat menjaga manusia agar tidak terjerumus pada perilaku ini.

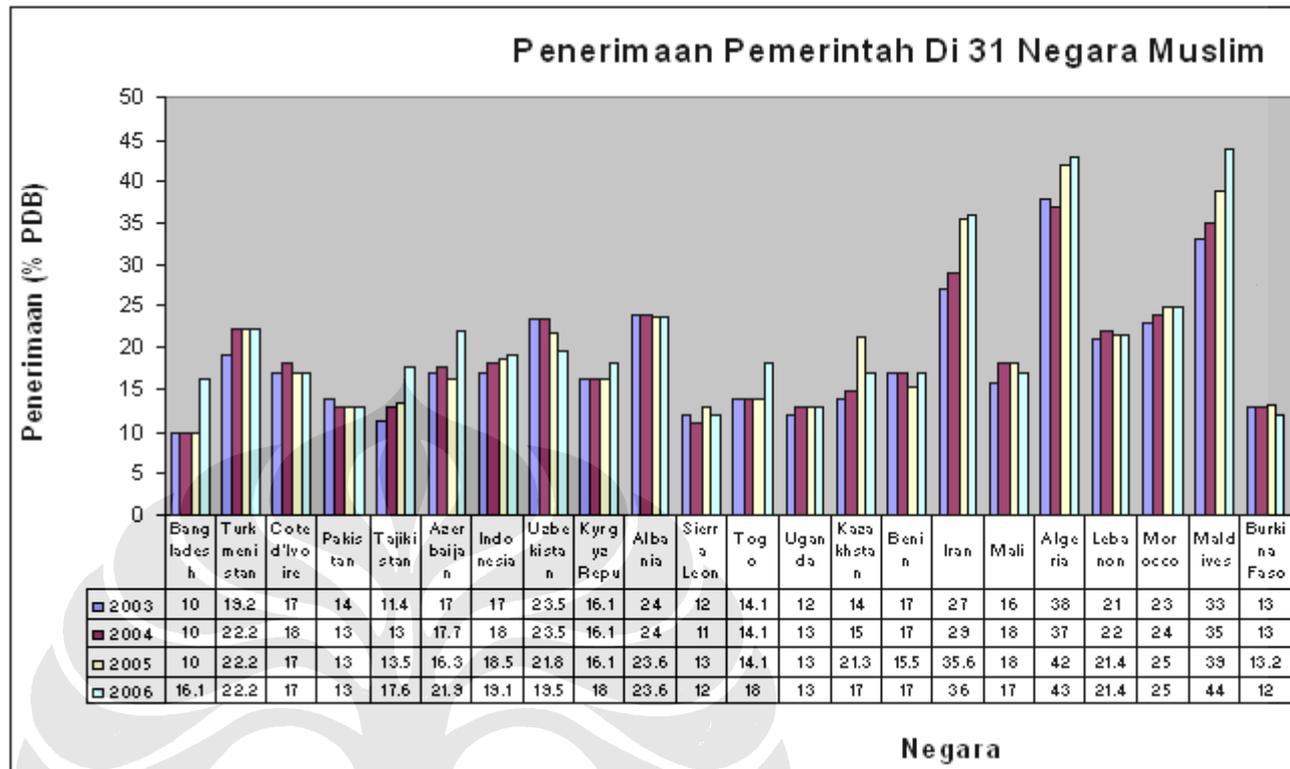
4.2.3. Anggaran Pemerintah Negara Muslim

Pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian, demi untuk kemakmuran rakyat banyak. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah terus berkembang seiring dengan aktivitas pemerintah dalam perekonomian yang cenderung meningkat.

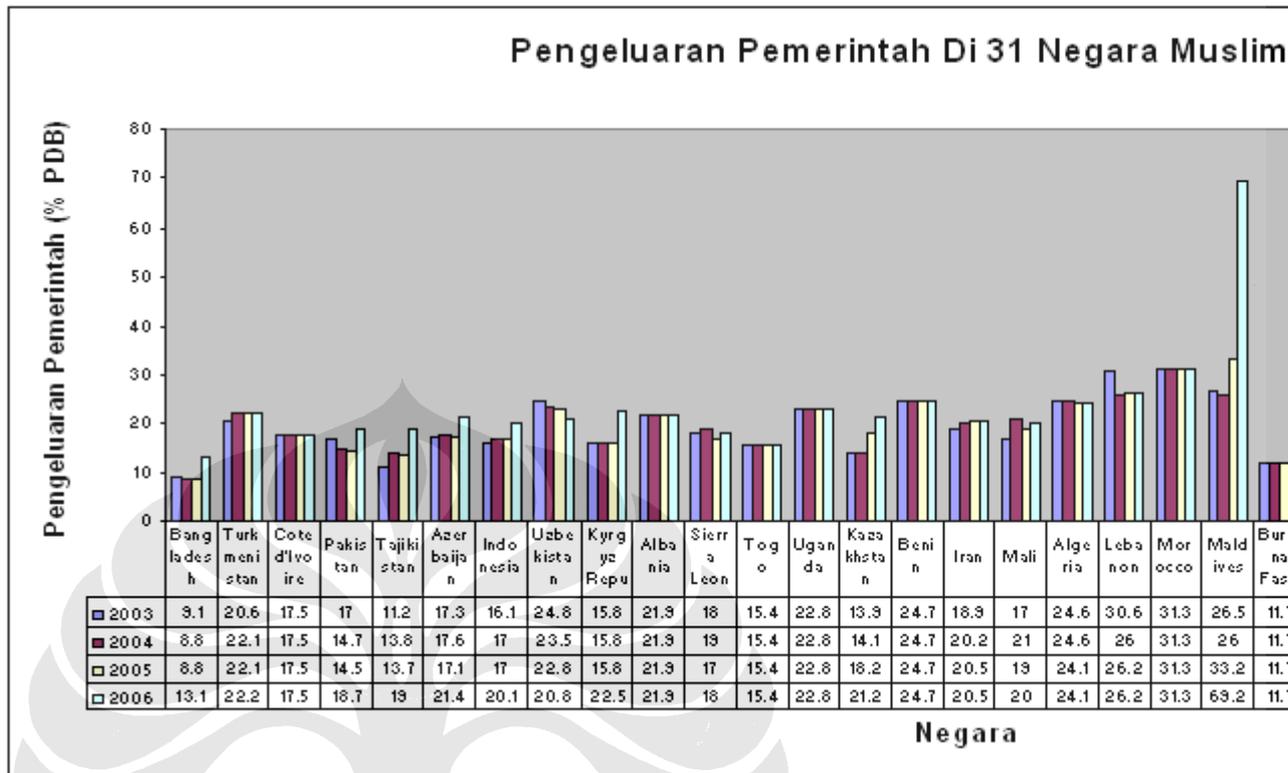
Pengeluaran pemerintah adalah jumlah keseluruhan anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk satu tahun anggaran. Data pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosentase dari GDP (*Gross Domestic Product*) atau PDB. Penerimaan Pemerintah adalah penerimaan pemerintah total yang diterima oleh pemerintah untuk satu tahun anggaran. Data penerimaan pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosentase dari GDP (*Gross Domestic Product*).

Penerimaan pemerintah di negara muslim dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah rata-rata sebesar 22 persen dari PDB, sementara pengeluaran pemerintahnya rata-rata sebesar 23 persen dari PDB. Jadi sangat wajar jika terjadi defisit anggaran. Hal ini juga disebabkan karena faktor kebutuhan pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, sementara penerimaan negara masih rendah.

Grafik 4.3. Penerimaan Pemerintah Di 31 Negara Muslim



Grafik 4.4. Pengeluaran Pemerintah Di 31 Negara Muslim



4.3. Analisa Di Setiap Kelompok Negara

Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode estimasi *maximum likelihood*. Metode ini merupakan metode estimasi yang sering digunakan untuk analisis data dan pengujian secara statistik dilakukan dengan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) menggunakan *software* Amos version 6.0.

4.3.1. Uji Kesesuaian Model

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data *Structural Equation Modeling* (SEM). Sebelum menganalisa *Structural Equation Modeling*, terlebih dahulu dilakukan pengujian kesesuaian model (*goodness-of-fit model*). Pengujian kesesuaian model (*goodness-of-fit model*) dilakukan dengan melihat beberapa kriteria pengukuran, yaitu :

- (1) ***Absolute fit measure*** yaitu mengukur model fit secara keseluruhan (baik model struktural maupun model pengukuran secara bersamaan). Kriterianya dengan melihat nilai *chi-square*, *probability*, *goodness-of-fit Index* (GFI), dan *root mean square error of approximation* (RMSEA);
- (2) ***Incremental fit measures*** yaitu ukuran untuk membandingkan model yang diajukan (*proposed model*) dengan model lain yang dispesifikasi oleh peneliti. Kriterianya dengan melihat : *turker-lewis index* (TLI), *adjusted goodness-of-fit index* (AGFI), *comparative fit index* (CFI), dan hasil pengukuran tingkat kesesuaian model ditampilkan pada tabel di bawah ini untuk masing :

Tabel 4.3. Pengukuran Tingkat Kesesuaian Model Negara Korupsi Tinggi

Pengukuran <i>Goodness-of-fit</i>	Batas Penerimaan Yang Disarankan	Hasil
GFI	> 0,90 atau mendekati 1	1,000
CFI	> 0,90 atau mendekati 1	1,000

Sumber : Lampiran I Tesis

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara keseluruhan perhitungan tingkat kesesuaian model menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan demikian secara keseluruhan model persamaan *structural* yang digunakan dapat diterima.

Tabel 4.4. Pengukuran Tingkat Kesesuaian Model Negara Korupsi Rendah

Pengukuran <i>Goodness-of-fit</i>	Batas Penerimaan Yang Disarankan	Hasil
GFI	> 0,90 atau mendekati 1	1,000
CFI	> 0,90 atau mendekati 1	1,000

Sumber : Lampiran I Tesis

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara keseluruhan perhitungan tingkat kesesuaian model menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan demikian secara keseluruhan model persamaan *structural* yang digunakan dapat diterima.

Dari model persamaan struktural, dapat dilihat nilai R^2 yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh masing-masing variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil Pengujian koefisien determinasi (Pengujian R^2) di dapat :

Tabel 4.5. Hasil Uji R^2 Negara Korupsi Tinggi

	R^2
PENGELUARAN PEMERINTAH	.23 9
KESEJAHTERAAN	.26 0

Sumber : Lampiran I Tesis

Dari hasil uji R^2 diatas diketahui didapat dua R^2 dari persamaan model struktural Amos yang digunakan. Persamaan pertama yaitu model persamaan penerimaan pemerintah terhadap pengeluaran pemerintah, didapat nilai R^2 sebesar 0,239. Hal ini berarti variabel penerimaan pemerintah dapat menjelaskan variasi pada variabel pengeluaran pemerintah sebesar 23,9%, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam persamaan tersebut.

Persamaan kedua yaitu model persamaan penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan, didapat nilai R^2 sebesar 0,260. Hal ini berarti variabel penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan variasi pada variabel kesejahteraan sebesar 26%, sedangkan sisanya

dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam persamaan tersebut.

Tabel 4.6. Hasil Uji R^2 Negara Korupsi Rendah

	R^2
PENGELUARAN PEMERINTAH	.13 4
KESEJAHTERAAN	.30 2

Sumber : data diolah Amos 6.0

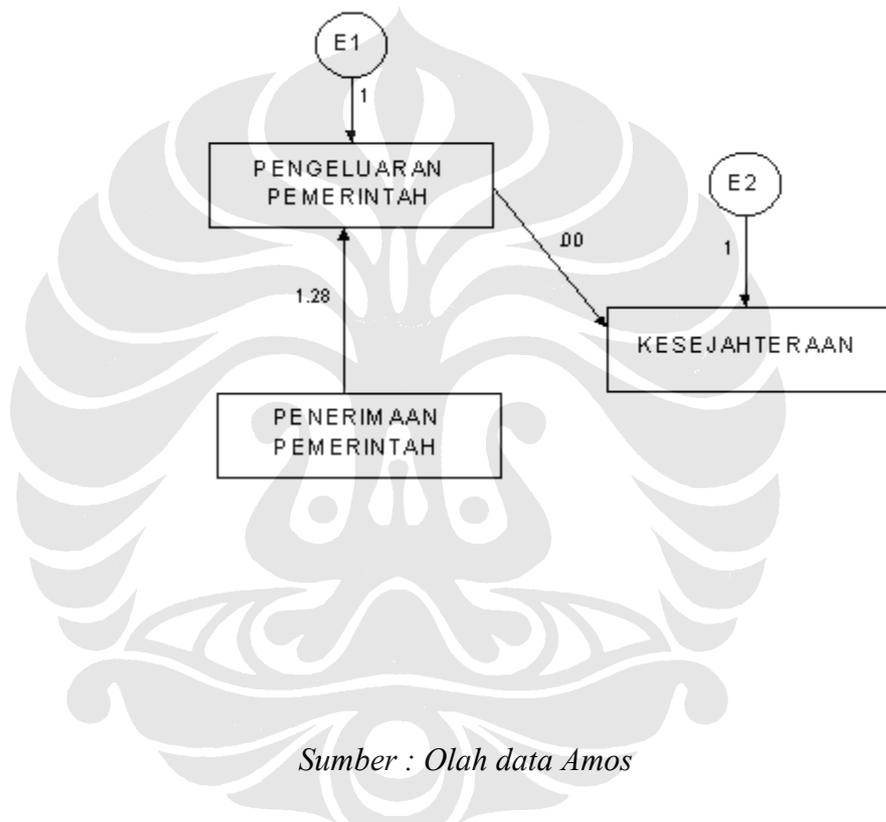
Dari hasil uji R^2 diatas diketahui didapat dua R^2 dari persamaan *structural* model amos yang digunakan. Persamaan pertama yaitu model persamaan penerimaan pemerintah terhadap pengeluaran pemerintah, didapat nilai R^2 sebesar 0,134. Hal ini berarti variabel penerimaan pemerintah dapat menjelaskan variasi pada variabel pengeluaran pemerintah sebesar 13,4%, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh factor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam persamaan tersebut.

Persamaan kedua yaitu model persamaan penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan, didapat nilai R^2 sebesar 0,302. Hal ini berarti variabel penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan variasi pada variabel kesejahteraan sebesar 30,2%, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam persamaan tersebut.

4.3.2. Uji Signifikansi dan Analisa Pengaruh

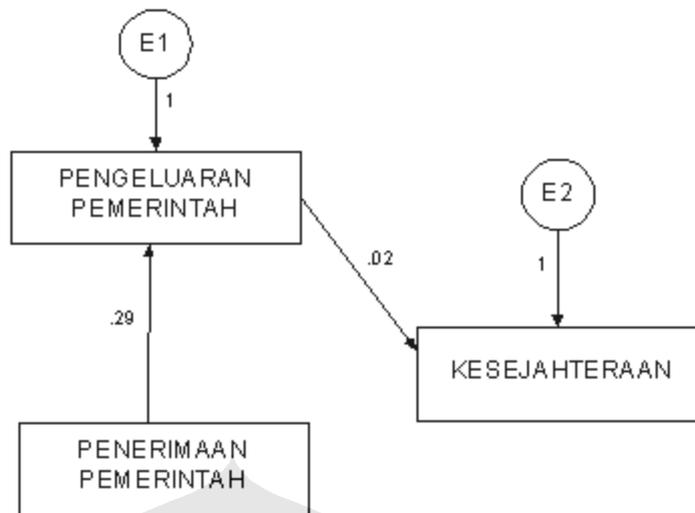
Pengambilan keputusan uji signifikansi adalah dengan membandingkan besarnya *p-value* dengan *level of significant* sebesar 5% (α 0,05). Jika *p-value* lebih besar dari *level of significant* sebesar 5% maka pengaruh variabel dinyatakan tidak signifikan secara statisik. Demikian pula sebaliknya jika *p-value* lebih kecil dari *level of significant* sebesar 5% maka dinyatakan terdapat pengaruh yang

signifikan variabel tersebut.



Sumber : Olah data Amos

Gambar 4.1. Structural Equation Modeling Di Negara Korupsi Tinggi



Sumber : Olah data Amos

Gambar 4.2. Structural Equation Modeling Di Negara Korupsi Rendah

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Negara Korupsi Tinggi

		Estimate	<i>p-value</i>	Kesimpulan
Penerimaan Pemerintah	→ Pengeluaran Pemerintah	1,281	0,000	Signifikan

Sumber : Lampiran I Tesis

Hasil analisa dengan *Amos 6.0* menunjukkan bahwa variabel penerimaan pemerintah memiliki nilai estimasi yang positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah sebesar 1,281. *P-value* variabel penerimaan pemerintah adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari *level of significant* sebesar 5%. Hal ini berarti jika penerimaan pemerintah meningkat sebesar 1 maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1,281.

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Negara Korupsi Rendah

		Estimate	<i>p-value</i>	Kesimpulan
Penerimaan Pemerintah	→ Pengeluaran Pemerintah	.292	0,036	Signifikan

Sumber : Lampiran I Tesis

Hasil analisa dengan *Amos 6.0* menunjukkan bahwa variabel penerimaan pemerintah memiliki nilai estimasi yang positif dan signifikan terhadap

pengeluaran pemerintah sebesar 0,292. *P-value* variabel penerimaan pemerintah adalah sebesar 0,036 lebih kecil dari *level of significant* sebesar 5%. Hal ini berarti jika penerimaan pemerintah meningkat sebesar 1 maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 0.292.

Penerimaan pemerintah di kedua kelompok negara berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam bahwasanya untuk mewujudkan sistem ekonomi yang Islami, mentauladani Rasulullah SAW dengan berpegang teguh pada petunjuk dari Al-Qur'an mulai menggali potensi penerimaan negara dari berbagai sumber. Semakin besar dana yang terkumpul maka semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk pengeluaran negara dan kemashlahatan masyarakat. Namun kedua output tersebut juga menunjukkan bahwa tambahan peningkatan pengeluaran pemerintah oleh penerimaan pemerintah lebih besar di negara yang tingkat korupsinya rendah.

Analisa selanjutnya ialah melihat pengaruh penerimaan pemerintah terhadap kesejahteraan pemerintah secara tidak langsung melalui pengeluaran pemerintah. Uji *indirect effect* merupakan pengujian pengaruh secara tidak langsung antara variabel bebas yang satu terhadap variabel tidak bebas yang kedua melalui variabel tidak bebas yang pertama. *Indirect effect* dapat kita hitung secara manual dengan cara mengalikan *direct effect* antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas yang pertama dengan *direct effect* variabel tidak bebas yang pertama terhadap variabel tidak bebas yang kedua. Hasil pengujian *indirect effect* secara manual maupun secara program Amos 6,0 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9. Total Efek Negara Korupsi Tinggi

	PENERIMAAN	PENGELUARAN PEMERINTAH
PENGELUARAN PEMERINTAH	1.281	.000
KESEJAHTERAAN	.006	.005

Sumber : Lampiran I Tesis

Tabel diatas menunjukkan total efek dari seluruh persamaan model amos yang digunakan. Untuk mengetahui *indirect effect* dari variabel bebas yang satu terhadap variabel tidak bebas yang kedua melalui variabel tidak bebas yang

pertama adalah dengan cara mengalikan mengalikan *direct effect* antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas yang pertama dengan *direct effect* variabel tidak bebas yang pertama terhadap variabel tidak bebas yang kedua.

Di negara yang tingkat korupsinya tinggi penerimaan pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah. Hal ini sejalan dengan sebagaimana dalam pandangan Islam, uang negara yang bersumber dari rakyat pada hakikatnya adalah uang Allah yang diamanatkan kepada negara untuk dibagi-bagikan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan seluruh rakyat, tanpa diskriminasi apapun. Sehingga jika amanah ini tidak dijaga dengan baik akan membawa malapetaka, salah satunya berupa kemiskinan.

Tabel 4.10. Total Efek Negara Korupsi Rendah

	PENERIMAAN	PENGELUARAN PEMERINTAH
PENGELUARAN PEMERINTAH	.000	.000
KESEJAHTERAAN	.005	.000

Sumber : Lampiran I Tesis

Tabel diatas menunjukkan total efek dari seluruh persamaan model amos yang digunakan. Untuk mengetahui *indirect effect* dari variabel bebas yang satu terhadap variabel tidak bebas yang kedua melalui variabel tidak bebas yang pertama adalah dengan cara mengalikan mengalikan *direct effect* antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas yang pertama dengan *direct effect* variabel tidak bebas yang pertama terhadap variabel tidak bebas yang kedua.

Dari uji *indirect effects* dapat disimpulkan bahwa penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh yang positif sebesar 0,002 terhadap kesejahteraan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Hal ini sesuai dengan sistem ekonomi yang Islami, bahwasanya dengan berpegang teguh pada petunjuk dari Al-Qur'an, pemerintah diharapkan mulai menggali potensi penerimaan negara dari berbagai sumber. Semakin besar dana yang terkumpul maka semakin besar pula dana yang dialokasikan kemaslahatan

masyarakat. Hampir sejalan dengan penelitian Miller dan Russex (1997) yaitu tentang pengaruh struktur fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal di Amerika Serikat. Hasil penelitiannya menyimpulkan penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan pajak digunakan untuk membangun infrastruktur.

Analisa selanjutnya ialah melihat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Negara Korupsi Tinggi

		Estimate	<i>p-value</i>	Kesimpulan
Pengeluaran Pemerintah	→ Kesejahteraan masyarakat	.005	.109	Signifikan

Sumber : Lampiran I Tesis

Hasil analisa dengan *Amos 6.0* menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai estimasi yang positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan pemerintah sebesar 0,005. *P-value* variabel pengeluaran pemerintah adalah sebesar 0,109 lebih besar dari *level of significant* sebesar 5%.

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Negara Korupsi Rendah

		Estimate	<i>p-value</i>	Kesimpulan
Pengeluaran Pemerintah	→ Kesejahteraan Pemerintah	.019	0,001	Signifikan

Sumber : Lampiran I Tesis

Hasil analisa dengan *Amos 6.0* menunjukkan bahwa *P-value* variable pengeluaran pemerintah adalah sebesar 0,001 lebih kecil dari *level of significant* sebesar 5%. Hal ini berarti pula bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai estimasi yang positif terhadap kesejahteraan pemerintah sebesar 0,005. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Sutikno (2000) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dan beberapa penelitian lainnya.

Penyusunan anggaran yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya. Kontribusinya tidak hanya mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan stabilitas ekonomi serta peningkatan pendapatan perkapita (World Bank, 2001). Namun di satu sisi pengeluaran pemerintah di negara kelompok I berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa negara kelompok pertama ini adalah kelompok negara yang memiliki tingkat korupsi relatif tinggi. Sehingga alokasi belanja negara yang tidak berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimungkinkan karena tata kelola pemerintah yang buruk, budaya korupsi yang masih melekat dari para aparat pemerintahnya. Korupsi merupakan salah satu penghambat terbesar perkembangan ekonomi dan manusia. Memahami makna teks di banyak ayat Al-Quran dan Hadits, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak membawa keberkahan dan kemashlahatan bagi umat.

Sementara itu, pada sisi penerimaan pemerintah, pengaruh langsung penerimaan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat lebih tinggi di negara yang korupsinya tinggi lebih kecil daripada di negara yang korupsinya rendah. Hal dapat diartikan bahwa di negara yang korupsinya tinggi, cenderung penerimaan pemerintah mengandalkan dari dana masyarakat (pajak), sehingga jika penerimaan pemerintah naik, dapat diindikasikan kesejahteraan masyarakat juga naik secara signifikan. Sedangkan di negara yang korupsinya rendah, penerimaan pemerintah lebih mengandalkan penerimaan negara dari sisi pemanfaatan sumber daya alamnya.

Hal tersebut di atas akan semakin jelas bagaimana pengaruh korupsinya, jika kita melihat *indirect effects* penerimaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan, *indirect effects* penerimaan terhadap kesejahteraan di negara yang korupsinya tinggi lebih kecil daripada di negara yang korupsinya rendah. *indirect effects* penerimaan terhadap kesejahteraan di negara yang korupsinya tinggi sebesar -0,004 dan sebesar 0,002 di negara yang korupsinya rendah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terjadi kebocoran pada sisi pengeluaran pemerintah sehingga memberikan dampak kurang memberikan pengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan bisa jadi alokasi anggaran yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, atau terjadi korupsi pada

alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal inilah yang merupakan kondisi secara umum negara-negara Islam sebagai negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi di dunia. Dengan mengutip laporan *Transparency Internasional* tahun 2005, negara Muslim hanya bisa mencapai ranking 29 dari 158 negara yang disurvei.

Selain itu secara filosofis, keadaan ini juga diterangkan oleh Umer Chapra yaitu beliau ingin menegaskan (dengan membuat pemaparan cukup komprehensif terutama atas dasar dan dengan landasan filosofis dan teoritis), bahwa umat Islam tidak perlu berpaling ke Timur atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi. Tetapi berpaling pada Islam. Chapra mengamati bahwa banyak negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari Barat dan Timur, dengan menerapkan sistem kapitalis, sosialis atau negara kesejahteraan. Beliau menekankan bahwa selama negara-negara Muslim terus menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, mereka tidak akan mampu, berbuat melebihi negara-negara kapitalis dan sosialis, mencegah penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dengan demikian akan ditekan secara otomatis, menjadikannya sulit untuk merealisasikan *maqashid* meskipun terjadi pertumbuhan kekayaan.

Di satu sisi Ibnu Khaldun sudah mengingatkan bahwa kekayaan sumberdaya yang melimpah cenderung memerangkap bangsa-bangsa untuk bergantung dan tidak produktif. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun, bahwa kekayaan dan pembangunan sebuah bangsa tidak bisa hanya bergantung pada keberadaan tambang emas dan perak. (kekayaan sumberdaya). Kekayaan dan pembangunan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh aktivitas ekonomi yang mencakup keluasan jumlah dan pembagian tenaga kerja, luasnya pasar, kecukupan tunjangan dan fasilitas yang disediakan oleh negara, serta riset dan teknologi yang pada gilirannya tergantung pada investasi dari hasil tabungan atau surplus yang dihasilkan setelah memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan maka pendapatan negara akan semakin besar. Pendapatan yang besar akan memberikan kontribusi yang lebih besar di dalam

pembangunan dan kesejahteraan sebuah bangsa. Secara umum Sebagian besar negara muslim kepentingan politik lebih banyak mempengaruhi kebijakan ekonomi negara bersangkutan. Sehingga implementasi nilai-nilai syariah yang tercantum dalam dasar negara muslim tersebut lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik negara bersangkutan daripada nilai yang terkandung dalam ajaran Islam (Schat, 1953:524-529). Kepentingan pemerintah cukup dominan dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi dibanding kepentingan rakyat (Hudson, 1985:51-52).

4. Analisa Kesejahteraan Masyarakat di Negara yang Korupsinya Tinggi dan Rendah.

4.4.1. Uji Kesesuaian Model.

Pengujian kesesuaian model (*goodness-of-fit model*) dilakukan dengan melihat beberapa kriteria pengukuran, yaitu :

- (1) ***Absolute fit measure*** yaitu mengukur model fit secara keseluruhan (baik model struktural maupun model pengukuran secara bersamaan). Kriterianya dengan melihat nilai *chi-square*, *probability*, *goodness-of-fit Index* (GFI), dan *root mean square error of approximation* (RMSEA);
- (2) ***Incremental fit measures*** yaitu ukuran untuk membandingkan model yang diajukan (*proposed model*) dengan model lain yang dispesifikasi oleh peneliti. Kriterianya dengan melihat : *turker-lewis index* (TLI), *adjusted goodness-of-fit index* (AGFI), *comparative fit index* (CFI), dan
- (3) ***Parsimonious fit measures*** yaitu melakukan *adjustment* terhadap pengukuran fit untuk dapat diperbandingkan antar model dengan jumlah koefisien yang berbeda. Kriterianya dengan melihat nilai *normed chi-square* (CMIN/DF).

Hasil pengukuran tingkat kesesuaian model ditampilkan pada tabel di bawah ini :

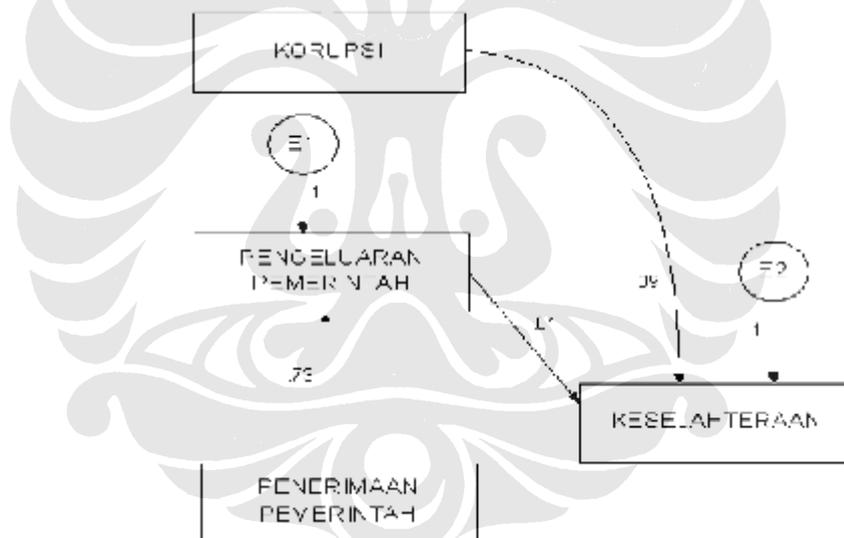
Tabel 4.13. Pengukuran Tingkat Kesesuaian (*goodness-of-fit model*)

Pengukuran <i>Goodness-of-fit</i>	Batas Penerimaan Yang Disarankan	
<i>Chi-square</i>	<i>chi-square</i> rendah	1,285

	X ² tabel DF 1	
<i>p-value</i>	Minimal 0,05 atau diatas 0,05	0,257
GFI	> 0,90 atau mendekati 1	0,995
AGFI	> 0,90 atau mendekati 1	0,948
CFI	> 0,90 atau mendekati 1	0,997
TLI	> 0,90 atau mendekati 1	0,984
RMSEA	Dibawah 0,080 atau 0,050	0,048
<i>Normed chi-square</i>	batas bawah : 1 batas atas : 2, 3, atau 5	1,285

Sumber : Lampiran I Tesis

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara keseluruhan perhitungan tingkat kesesuaian model menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan demikian secara keseluruhan model persamaan struktural yang digunakan dapat diterima dan pengujian hipotesa dapat dilakukan.



Sumber : data diolah Amos 6.0

Gambar 4.3. Structural Equation Modeling

Dari model persamaan struktural, dapat dilihat nilai R^2 yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh masing-masing variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil Pengujian koefisien determinasi (Pengujian R^2) di dapat :

Tabel 4.14. Hasil Uji R^2

	R^2
PENGELUARAN	.35
KESEJAHTERAA	.38
N	6

Sumber : Lampiran 2 Tesis

Dari hasil uji R^2 diatas diketahui didapat dua R^2 dari persamaan *structural* model Amos yang digunakan. Persamaan pertama yaitu model persamaan penerimaan pemerintah terhadap pengeluaran pemerintah, didapat nilai R^2 sebesar 0,354. Hal ini berarti variable penerimaan pemerintah dapat menjelaskan variasi pada variabel pengeluaran pemerintah sebesar 35,4%, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam persamaan tersebut.

Persamaan kedua yaitu model persamaan penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah dan korupsi terhadap kesejahteraan pemerintah, didapat nilai R^2 sebesar 0,386. Hal ini berarti variabel penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah dan korupsi dapat menjelaskan variasi pada variable kesejahteraan sebesar 38,6%, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh factor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam persamaan tersebut.

4.4.2. Uji Signifikansi Model

Pengambilan keputusan uji signifikansi adalah dengan membandingkan besarnya *p-value* dengan *level of significant* sebesar 5% (alpha 0,05). Jika *p-value* lebih besar dari *level of significant* sebesar 5% maka pengaruh variabel dinyatakan tidak signifikan secara statisik. Demikian pula sebaliknya jika *p-value* lebih kecil dari *level of significant* sebesar 5% maka dinyatakan terdapat pengaruh yang signifikan variabel tersebut.

Tabel 4.15. Hasil Pengujian Negara Korupsi Tinggi

		Estimate	<i>p-value</i>	Kesimpulan
Korupsi	→ Kesejahteraan Masyarakat	0,090	0,078	Tidak Signifikan

Sumber : Lampiran II Tesis

Hasil analisa dengan *Amos 6.0* menunjukkan bahwa variabel korupsi memiliki nilai estimasi yang positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,090. Hal ini berarti tidak ada perbedaan kesejahteraan pemerintah pada negara korupsi tinggi dengan tingkat korupsinya rendah.

Keberadaan korupsi yang menyebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan. Korupsi merupakan salah satu penghambat yang besar untuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan. Korupsi mengurangi efisiensi usaha pengembangan kesejahteraan (development), mengelakkan keadilan, melemahkan demokrasi, membuat yang kaya menjadi lebih kaya dan mendukung para diktator. Korupsi juga akan menyebabkan berkurangnya investasi domestik dan asing, berkurangnya penerimaan pajak dan melemahkan jiwa kewirausahaan, berkurangnya pengeluaran pemerintah, sehingga komposisi pengeluaran pemerintah terjadi ketidaktepatan alokasi. Dampak terakhirnya akan melemahkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan barang publik dan mengganggu sistem jaminan sosial. Hal ini akan berdampak terhadap semakin meningkatnya angka kemiskinan (Chetwynd, 2003). Di kedua kelompok negara Muslim secara rata-rata memiliki tingkat korupsi yang relatif tinggi walaupun terdapat sedikit perbedaan.